

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pendidikan kejuruan di Indonesia, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja.<sup>1</sup> Menurut Murniati & Nasir Usman dalam Ira juga berpendapat bahwa pendidikan kejuruan mencetak lulusan dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan siap kerja (*ready for use*).<sup>2</sup> Kemudian didukung oleh pendapat Agus, dkk. bahwa “Pendidikan kejuruan dapat menjadi tulang punggung perbaikan ekonomi negara dalam jangka panjang yang lebih futuristik jika kompetensi lulusannya diarahkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan bisnis.”<sup>3</sup> Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan kejuruan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama jika didukung oleh kolaborasi erat dengan dunia usaha dan industri. Hal ini juga didukung oleh pendapat Fuad, dkk. bahwa selain lulusan yang berkualitas peran tenaga pendidik yang mumpuni juga menjadi faktor utama yang membuahkan hasil yang berkualitas pula.

Namun, kendala utama yang dihadapi dalam pendidikan kejuruan adalah memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan di sekolah benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI), sehingga lulusan dapat langsung terserap di pasar kerja tanpa memerlukan pelatihan tambahan yang membebani industri. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya perubahan kebutuhan tenaga kerja yang dinamis akibat perkembangan

---

<sup>1</sup> Triyono, M. B., Pardjono, P., Sudira, P., Mahfud, T., Hariyanto, D., Maryadi, T. H. T., ... & Yuliana, I. *Redesain bidang keahlian dan program keahlian SMK pada revolusi industri 4.0: Pedoman teknis*, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). p. 1.

<sup>2</sup> Ira Luvi Indah Astutik, ‘Evaluasi Pelaksanaan Uji Sertifikasi LSP P1 Terhadap Peningkatan Kompetensi Peserta Didik Melalui Model CIPP Di SMK Negeri 2 Kota Kediri’, *Jurnal Teknologi Pendidikan: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembelajaran*, 8.1 (2023), p. 173, doi:10.33394/jtp.v8i1.6834.

<sup>3</sup> Agus Prianto, Winardi, dan Umi Nur Qomariyah, *Seri Pendidikan SMK: Fenomena Global dan Pengaruhnya Terhadap Pembelajaran di SMK*, PUSTAKA ILMU. p. 2.

teknologi dan globalisasi, yang menuntut kurikulum SMK untuk terus disesuaikan agar tetap relevan.

Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lulusan SMK pada tahun 2024 memiliki angka pengangguran kedua tertinggi dibandingkan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya yang digambarkan pada tabel tersebut.<sup>4</sup>

No.		2024	
		Februari	Agustus
1	SD ke bawah	1265448	1228158
2	SLTP	1154255	1091015
3	SLTA Umum/SMU	2107781	2293359
4	SLTA Kejuruan/SMK	1621672	1840162
5	Akademi/Diploma	173846	170527
6	Universitas	871860	842378
	Total	7194862	7465599

*Gambar 1. 1 Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan data Bdan Pusat Statistik (BPS)*

Angka ini mencerminkan masih adanya tantangan besar dalam memastikan lulusan SMK dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kesenjangan antara harapan dunia industri dan kompetensi lulusan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran ini. Padahal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara spesifik menyebutkan tujuan khusus SMK yaitu menyiapkan peserta didik supaya menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya.<sup>5</sup> Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan institusi pendidikan dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Meski demikian, implementasi dari tujuan ini membutuhkan dukungan menyeluruh,

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistika, Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, (2025).

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, 'Sistem Pendidikan Nasional', 2003, p. 30.

baik dari sisi kebijakan, fasilitas, maupun partisipasi aktif dunia industri, agar lulusan SMK benar-benar memiliki kompetensi yang relevan dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

Sehubungan dengan hal itu, terdapat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia pada instruktur kedua yang dikhususkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk: (1) Membuat peta jalan pengembangan SMK, (2) Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*), (3) Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi Pendidikan dan tenaga kependidikan SMK, (4) Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha/Industri (DU/DI), (5) Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, dan (6) Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.<sup>6</sup> Instruksi ini menjadi pedoman penting bagi setiap institusi pendidikan kejuruan dalam menjalankan fungsinya sebagai penghasil tenaga kerja terampil. Selain itu, keberhasilan implementasi Inpres ini juga sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan sektor industri, untuk bersama-sama mewujudkan kualitas lulusan SMK yang unggul dan berdaya saing global.

Berdasarkan Inpres di atas dapat dilihat bahwa peningkatan kualitas pendidikan kejuruan menjadi prioritas melalui berbagai program revitalisasi SMK yang dicanangkan tersebut. Salah satu langkah strategis dalam upaya revitalisasi ini adalah melaksanakan uji sertifikasi kompetensi Hal ini sejalan dengan pendapat Kamaludin, dkk. bahwa:

*“Professional certification institutions are key in ensuring that graduates have competency standards recognized by the industry. The cooperation between vocational training institutions (TVET) with*

---

<sup>6</sup> Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2016), hlm. 6.

*Professional Certification Institutions (LSP) and industry is important to align the curriculum with industry needs.”<sup>7</sup>*

Didukung dengan pendapat Baginda, dkk. bahwa Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara terstruktur dan objektif melalui uji kompetensi. Uji ini didasarkan pada standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau standar khusus lainnya. Untuk memperoleh sertifikasi ini, peserta harus mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).<sup>8</sup> Dari beberapa pendapat, dapat dimengerti bahwa sertifikasi kompetensi ini memastikan lulusan memiliki standar yang diakui industri melalui uji kompetensi berbasis standar nasional atau internasional. Proses ini membutuhkan kerja sama antara lembaga vokasi, LSP, dan industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, serta melibatkan lembaga yang ditunjuk atau bekerja sama dengan BNSP.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa uji sertifikasi kompetensi dalam penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang dikatakan oleh Pramesti sebagai peneliti terdahulu bahwa ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi, seperti tidak lengkapnya sarana prasarana, alokasi waktu yang tidak mencukupi, pelaksanaan sertifikasi yang belum memperlihatkan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam dunia kerja karena belum adanya sertifikasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).<sup>9</sup>, kemudian didukung oleh hasil penelitian Ira yang menyebutkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan industri nasional, alokasi waktu yang kurang memperhatikan karakteristik peserta didik SMK, dan sertifikasi

---

<sup>7</sup> Muhammad Kamaludin, dkk., ‘*The Need Mapping of Motorcycle Automotive Industry & LSP-PI Certification: A Collaboration between Professional Certification Institution Vocational High School (SMK-LSP) to Improve The Competitiveness of TVET Graduates in West Java Province*’, *VANOS Journal of Mechanical Engineering Education*, 9(2), 2024, pp. 11-18.

<sup>8</sup> Baginda Oloan Lubis dkk., *Sistem Informasi Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi Online pada SMK dengan Metode Web Base Engineering*, *Journal of Information System, Informatics and Computing*, vol. 5, no. 2 (2021), hlm. 40, <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.644>.

<sup>9</sup> Pramesti Khairunisa, *Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Keahlian OTKP SMK Negeri 45 Jakarta*, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 08, 2022, hlm. 744.

yang belum memenuhi skema Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level 2.<sup>10</sup> Tantangan-tantangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara standar sertifikasi yang ideal dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sertifikasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pelatihan khusus bagi asesor agar mampu mengevaluasi kompetensi peserta didik secara objektif. Selain itu Ferdawati, dkk. menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi peserta didik saat pelaksanaan uji sertifikasi adalah merasa belum terlatih padahal sudah 3 tahun belajar di sekolah dengan jurusannya, oleh karena itu hanya terdapat 56 dari 96 peserta didik yang mampu menyelesaikan tes dengan baik atau hamper 40% yang belum mampu menyelesaikan tes.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian metode pembelajaran di sekolah agar lebih berorientasi pada praktik dan kebutuhan pasar kerja.

Jika mengacu dari peraturan BNSP nomor 2/BNSP/III/2014 tentang pembentukan LSP dapat diklasifikasikan menjadi empat, meliputi LSP pihak ketiga (LSP-P3), LSP pihak kedua (LSP-P2), dan LSP pihak pertama (LSP-P1).<sup>12</sup> LSP-P1 merupakan Lembaga yang dibentuk oleh institusi Pendidikan atau pelatihan, LSP-P2 dibentuk oleh asosiasi atau organisasi profesi, dan LSP-P3 dibentuk secara independent oleh Perusahaan atau organisasi yang berfokus pada sertifikasi. Setiap tipe LSP memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam memastikan kompetensi tenaga kerja. Dalam hal pendidikan kejuruan, LSP-P1 menjadi pilihan strategis karena langsung terintegrasi dengan institusi pendidikan, memungkinkan peserta didik untuk memperoleh sertifikasi kompetensi sejak dini, bahkan sebelum mereka memasuki dunia kerja. Hal ini menciptakan proses transisi yang lebih mulus dari pendidikan ke dunia kerja. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya konkret dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan uji sertifikasi

---

<sup>10</sup> Ira Astutik, *Evaluasi Pelaksanaan Uji Sertifikasi LSP PI Terhadap Peningkatan Kompetensi Peserta Didik Melalui Model CIPP di SMK Negeri 2 Kota Kediri*, hlm. 175.

<sup>11</sup> Welsi Haslina, Armel Yentifa, and Reni Endang, 'Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Bagi Guru Dan Peserta didik Jurusan Akuntansi SMKN 3 Padang', 4.1 (2022), pp. 112.

<sup>12</sup> Badan Nasional Sertifikasi Profesi, *Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi* (Jakarta: BNSP, 2014), hlm. 3.

kompetensi, salah satunya melalui penerapan program Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1).

Salah satu institusi pendidikan yang aktif mengimplementasikan program LSP-P1 sebagai bagian dari upaya revitalisasi pendidikan kejuruan adalah SMK Negeri 26 Jakarta, dan sekolah ini sudah menjadi LSP-P1 sejak tahun 2018. Untuk menjadi sekolah LSP-P1, SMK harus mendapatkan Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP-P1 dengan beberapa kriteria: (1) SMK harus sudah terakreditasi, (2) Sudah menerapkan kurikulum yang berbasis pada standar kompetensi, dan (3) Harus memiliki tenaga asesor yaitu seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam sistem lisensi LSP.<sup>13</sup><sup>14</sup> Proses ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari pihak sekolah, mulai dari peningkatan kapasitas tenaga pendidik hingga penyediaan fasilitas pendukung untuk uji kompetensi. Dengan terpenuhinya persyaratan ini, SMK dapat secara langsung membantu peserta didiknya memperoleh sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga meningkatkan peluang kerja mereka.

SMK Negeri 26 Jakarta juga memiliki keunggulan utama yaitu tingginya tingkat keterserapan kerja yang mencapai 60%, karena sudah memiliki kemitraan yang baik dengan industri.<sup>15</sup> Kemitraan ini tidak hanya memfasilitasi penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang diakui secara profesional melalui sertifikasi. Kemitraan yang erat dengan dunia usaha dan dunia industri memungkinkan sekolah untuk memahami kebutuhan terkini di lapangan kerja dan menyesuaikan program pembelajarannya agar relevan. Berdasarkan hasil rekap data yang dilihat dari *tracer study* SMK Negeri 26 Jakarta tahun 2023, terdapat 58% peserta didik berhasil mendapatkan pekerjaan melalui perekrutan PKL atau bidang yang selinear. Salah satu faktor utama yang mendukung

---

<sup>13</sup> Desliana Maulipaksi, "327 SMK Sudah Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi," *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, 2017, diakses 20 Januari 2025, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/03/327-smk-sudah-jadi-lembaga-sertifikasi-profesi#:~:text=Jadi%20ada%20jalur%20untuk%20mengikuti,yang%20sekolahnya%20belum%20punya%20LSP.>

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Setianto, S.Pd., pada tanggal 13 Januari 2025, pukul 10.00.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet, S.Pd., pada tanggal 21 Juni 2024, pukul 11.00.

tingginya tingkat keterserapan ini adalah keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 di sekolah, yang memberikan sertifikasi kompetensi kepada peserta didik sebelum mereka terjun ke dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan adanya sertifikasi kompetensi dari LSP P1, lulusan SMK Negeri 26 Jakarta memiliki bukti konkret atas keterampilan yang mereka miliki, sehingga lebih mudah diterima oleh industri dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja.

Selain memiliki keunggulan tersebut, pemilihan SMK Negeri 26 Jakarta juga didasarkan pada beberapa pertimbangan logis dan strategis. Berdasarkan data terbaru, terdapat 182 SMK negeri dan swasta di wilayah Jakarta Timur, namun hanya 19 SMK yang telah memiliki lisensi resmi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Artinya, hanya sekitar 10% dari total SMK di wilayah tersebut yang telah terakreditasi sebagai LSP-P1.

Di antara sekolah-sekolah tersebut, SMK Negeri 26 Jakarta merupakan pelaksana LSP-P1 yang paling aktif, dengan cakupan skema sertifikasi yang luas (12 skema okupasi dan 1 skema KKNi Level II), serta pelaksanaan uji sertifikasi yang dilakukan secara konsisten setiap tahun. Skema-skema tersebut mencerminkan bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan asesmen sertifikasi kompetensi. Dalam LSP-P1, skema ini dirancang secara sistematis dan digunakan oleh asesor sebagai panduan untuk menilai apakah peserta didik telah memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya. Sekolah ini juga telah memiliki sarana Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memadai dan asesor-asesor bersertifikat yang diperbarui secara berkala.

Lebih dari itu, SMK Negeri 26 Jakarta pernah meraih peringkat pertama versi LTMPT sebagai SMK dengan nilai rerata UTBK tertinggi se-Indonesia, yang menunjukkan capaian akademik luar biasa bagi satuan pendidikan kejuruan. Selain itu, lokasi sekolah ini berdekatan dengan kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sehingga mendukung efektivitas mobilisasi peneliti dalam melakukan observasi dan pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan

seluruh pertimbangan tersebut, SMK Negeri 26 Jakarta dinilai representatif dan relevan untuk dijadikan lokasi penelitian dalam menggambarkan implementasi program uji sertifikasi kompetensi melalui LSP-P1 di wilayah Jakarta Timur.

Kemudian, peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih ruang lingkup atau skema yang ingin mereka fokuskan dalam Uji Sertifikasi.<sup>16</sup> Okupasi merupakan hasil perubahan skema sebelumnya yaitu KKNI Level II. Keuntungan perubahan skema KKNI Level II menjadi skema Okupasi ini adalah penggunaan waktu yang efektif, karena saat masih skema KKNI Level II, waktu pelaksanaan uji kompetensi bisa mencapai 3 hari bahkan lebih. Sedangkan setelah menjadi skema Okupasi, waktu pelaksanaan uji sertifikasi bisa hanya 1 sampai 2 hari saja.

Dari keunggulan yang dimiliki, LSP-P1 SMK Negeri 26 Jakarta tetap terus mengoptimalkan perbaikan agar para peserta didiknya semakin memiliki kualitas yang diakui oleh DUDI. Mulai dari 2 tahun belakang ini, SMK mulai merubah kebijakan untuk peserta didiknya wajib mengikut Uji Sertifikasi hingga mendapatkan Sertifikat Kompeten/Sertifikat Garuda. Dengan pendekatan ini, SMK Negeri 26 Jakarta tidak hanya mencetak lulusan berkualitas tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka pengangguran di kalangan lulusan SMK.

Sebagai LSP-P1, Sekolah menjadi tempat yang memfasilitasi kegiatan uji sertifikasi bagi para peserta didiknya, artinya sekolah tersebut sudah memiliki fasilitas yang memadai sebagai penunjang keberhasilan peserta didiknya tersebut. Fasilitas ini mencakup ruang uji yang sesuai standar, peralatan yang relevan dengan industri, dan sistem manajemen mutu yang mendukung pelaksanaan uji kompetensi. Dengan adanya fasilitas tersebut, peserta didik tidak hanya dapat mengikuti uji kompetensi dengan nyaman tetapi juga merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan uji. Selain itu, sekolah ini juga terus meng-*upgrade* lembaga (penyesuaian ruang lingkup) seperti yang baru-baru ini dilakukan atas arahan dari BNSP agar terus memiliki keterampilan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Langkah ini merupakan bukti komitmen sekolah dalam

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Setianto, S.Pd. *Ibid.*

memastikan bahwa lulusan mereka selalu memiliki keterampilan yang *up-to-date*, sejalan dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Menyediakan asesor yang kompeten termasuk salah satu upaya SMK Negeri 26 Jakarta menjadi LSP-P1. Asesor tersebut akan terus melakukan pembaruan sertifikat metodologi yang dimilikinya sebagai syarat menjadi asesor setiap 3 tahun.<sup>17</sup> Sertifikat asesor (sertifikat metodologi) yang dimiliki oleh para asesor di LSP-P1 mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun dan apabila telah kadaluarsa maka asesor tersebut harus mengajukan perpanjangan sertifikat melalui mekanisme RCC (*Recognition Current Competency*) ke BNSP. Keberadaan asesor yang berkualitas sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan validitas proses sertifikasi kompetensi. Dengan pembaruan berkala, asesor dapat terus meningkatkan kompetensinya dan mampu mengikuti perkembangan standar industri yang terus berubah. Artinya, sekolah tersebut memiliki faktor penunjang sebagai LSP-P1 untuk dapat meningkatkan kompetensi peserta didik.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana sekolah dapat meningkatkan daya saing lulusan SMK di tengah persaingan tenaga kerja yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun global. Dunia usaha dan industri (DUDI) saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu menunjukkan bukti sertifikasi yang diakui secara resmi. Dengan adanya program LSP-P1, lulusan SMK diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Artinya, sekolah tersebut memiliki faktor penunjang sebagai LSP-P1 untuk dapat meningkatkan kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana sekolah dapat meningkatkan daya saing lulusan SMK di tengah persaingan tenaga kerja yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan meningkatkan daya saing melalui sertifikasi kompetensi, lulusan SMK diharapkan tidak hanya mampu bersaing di pasar kerja domestik tetapi juga memiliki peluang untuk bekerja di pasar internasional. Selain itu, daya saing

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Setianto, S.Pd. *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

ini juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan citra SMK sebagai lembaga pendidikan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dunia usaha dan industri (DUDI) saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu menunjukkan bukti sertifikasi yang diakui secara resmi. Dengan adanya program LSP-P1, lulusan SMK diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Bukti sertifikasi ini tidak hanya menjadi dokumen formal tetapi juga menjadi indikator kompetensi yang dapat meningkatkan kepercayaan industri terhadap lulusan SMK. Dengan demikian, program ini juga memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia kerja.

Menurut Bruri, dkk. bahwa “Pengembangan SMK dituntut harus fleksibel dan responsif dalam menghadapi tuntutan dan perubahan masa depan khususnya pada Revolusi Industri 4.0.”<sup>19</sup> Artinya dalam era Revolusi Industri 4.0, kebutuhan akan tenaga kerja terampil semakin meningkat. Transformasi digital dan otomatisasi menuntut kemampuan khusus yang hanya dapat dipenuhi oleh individu yang memiliki kompetensi tertentu. Sertifikasi kompetensi melalui LSP-P1 menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan ini. Dengan adanya tuntutan revolusi industri ini, peserta didik SMK perlu didorong untuk menguasai teknologi terkini serta memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Hal ini penting agar mereka dapat terus relevan di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat.

Dengan memiliki sertifikat kompetensi, lulusan SMK dapat membuktikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama dalam implementasi program LSP-P1 di SMK Negeri 26 Jakarta, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga aspek ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan program sekaligus mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini juga diharapkan

---

<sup>19</sup> Triyono, M. B., Pardjono, P., Sudira, P., Mahfud, T., Hariyanto, D., Maryadi, T. H. T., ... & Yuliana, I., *Redesain bidang keahlian dan program keahlian SMK pada revolusi industri 4.0: Pedoman teknis* (2020), p. 10.

dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan untuk meningkatkan implementasi LSP-P1 di SMK lain.

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama dalam implementasi program LSP di SMK Negeri 26 Jakarta, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi kendala yang ada serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan program. Solusi ini mencakup aspek teknis, seperti peningkatan sarana prasarana dan kompetensi asesor, serta aspek non-teknis, seperti peningkatan pemahaman peserta didik dan orang tua terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan sertifikasi adalah proses sosialisasi dan pembekalan awal kepada peserta didik. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai alur, unit kompetensi, dan dokumen asesmen, peserta rentan mengalami kesulitan dalam mengikuti uji sertifikasi secara optimal. Oleh karena itu, pembekalan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen pelaksanaan program LSP-P1. Rekomendasi yang dihasilkan juga diharapkan dapat diimplementasikan tidak hanya di SMK Negeri 26 Jakarta, tetapi juga di SMK lain yang ingin mengikuti jejak keberhasilan sekolah ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali dukungan dari berbagai pihak, termasuk guru, dan pihak sekolah, dalam mendukung keberhasilan program LSP. Kolaborasi yang solid antara guru, kepala sekolah, dan asesor diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Kolaborasi antara pendidikan kejuruan dan dunia industri merupakan kunci untuk memastikan bahwa program sertifikasi kompetensi dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.<sup>20</sup> Dengan adanya sertifikasi kompetensi, peserta didik SMK memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pengakuan atas keterampilan mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sertifikasi ini tidak hanya membantu peserta didik mendapatkan pekerjaan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan

---

<sup>20</sup> Sri Nurhayati dan Sidik Eli Lahagu, *Pendidikan Sepanjang Ayat* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 27.

karier melalui pembelajaran seumur hidup. Hal ini sejalan dengan konsep *lifelong learning* yang semakin relevan dalam era globalisasi dan digitalisasi.<sup>21</sup>

Penelitian ini juga penting untuk mengevaluasi sejauh mana program LSP telah berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di kalangan lulusan SMK. Dengan memiliki data yang komprehensif mengenai dampak program ini, dapat disusun strategi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif, seperti jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja, tetapi juga pada aspek kualitatif, seperti kepuasan industri terhadap kompetensi lulusan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai keberhasilan program LSP.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia. Dengan memastikan bahwa program LSP dapat diimplementasikan dengan baik, SMK Negeri 26 Jakarta dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam melaksanakan program sertifikasi kompetensi. Keberhasilan SMK Negeri 26 Jakarta dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk melakukan langkah serupa, sehingga standar pendidikan kejuruan di Indonesia dapat terus meningkat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berfokus pada implementasi teknis program LSP, tetapi juga pada dampaknya terhadap peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya revitalisasi SMK dalam menghadapi tantangan masa depan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Uji Sertifikasi Kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) SMK Negeri 26 Jakarta.”**

## B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka peneliti menetapkan fokus pada penelitian ini adalah ”Implementasi Program Uji Sertifikasi

---

<sup>21</sup> Ahmad Dini, Salwa Khotimah, dan Yudi Ruswandi, “Lifelong Education: A Theoretical and Philosophical Review,” *Jurnal 2* (2024): 95–104.

Kompetensi melalui LSP-P1 SMK Negeri 26 Jakarta.” Adapun sub fokus penelitian ini yaitu:

1. Perencanaan program uji sertifikasi kompetensi melalui LSP-P1 SMK Negeri 26 Jakarta.
2. Pelaksanaan program uji sertifikasi kompetensi melalui LSP-P1 SMK Negeri 26 Jakarta.
3. Evaluasi program uji sertifikasi kompetensi melalui LSP-P1 SMK Negeri 26 Jakarta.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan sub fokus yang telah ditetapkan peneliti, antara lain:

1. Bagaimana perencanaan program uji sertifikasi kompetensi melalui LSP-P1 SMK Negeri 26 Jakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan program uji sertifikasi kompetensi melalui LSP-P1 SMK Negeri 26 Jakarta?
3. Bagaimana evaluasi program uji sertifikasi kompetensi melalui LSP-P1 SMK Negeri 26 Jakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan beberapa paparan pada fokus dan pertanyaan penelitian di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan program uji sertifikasi kompetensi melalui LSP-P1 SMK Negeri 26 Jakarta.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program uji sertifikasi kompetensi melalui LSP-P1 SMK Negeri 26 Jakarta.
3. Untuk mendeskripsikan evaluasi program uji sertifikasi kompetensi melalui LSP-P1 SMK Negeri 26 Jakarta.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis, sejalan dengan tujuan utama untuk menganalisis implementasi program uji sertifikasi kompetensi

melalui LSP-P1 di SMK Negeri 26 Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan dan mendukung revitalisasi SMK.

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pendidikan, khususnya dalam konteks implementasi program sertifikasi kompetensi berbasis LSP-P1 di SMK.
- b. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya terkait efektivitas dan tantangan program LSP-P1 sebagai bagian dari kebijakan revitalisasi SMK.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Sekolah (SMK Negeri 26 Jakarta dan SMK lain yang menjadi LSP-P1)

Memberikan gambaran menyeluruh terkait praktik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi uji sertifikasi kompetensi yang dapat dijadikan acuan dalam peningkatan mutu pelaksanaan sertifikasi.
- b. Bagi Peserta Didik

Memberikan pemahaman tentang pentingnya uji sertifikasi kompetensi sebagai sarana untuk meningkatkan kesiapan kerja dan daya saing di dunia industri.
- c. Bagi Pengelola LSP

Memberikan masukan berbasis data lapangan untuk perbaikan manajemen LSP, termasuk pengelolaan asesor, sarana uji, dan pengembangan skema sertifikasi.
- d. Bagi Pembuat Kebijakan (Kemdikbud, Dinas Pendidikan, BNSP)

Memberikan data empiris mengenai dampak dan efektivitas implementasi LSP-P1 di tingkat satuan pendidikan, yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan penguatan revitalisasi SMK.

### 3. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara sosial, yang mana penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan peluang kerja lulusan SMK melalui sertifikasi kompetensi yang diakui industri. Dengan begitu, lulusan lebih siap kerja, angka pengangguran bisa berkurang, dan masyarakat semakin percaya pada pendidikan kejuruan sebagai pilihan yang tepat untuk masa depan.



*Intelligentia - Dignitas*